



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## INDUSTRI SAWIT 2026: OPTIMISME PERTUMBUHAN DAN TANTANGAN KEBERLANJUTAN

**Eka Budiyantri**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[eka.budiyantri@dpr.go.id](mailto:eka.budiyantri@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Industri sawit Indonesia memasuki tahun 2026 dengan optimisme pertumbuhan yang ditopang oleh kenaikan produksi dan tren harga minyak kelapa sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) yang masih tinggi. Industri sawit mencatat kinerja yang solid sepanjang tahun 2025. Hingga September 2025 produksi minyak sawit nasional telah mencapai lebih dari 43 juta ton, tumbuh 11% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Industri sawit mengelola sekitar 16,8 juta hektare lahan di Indonesia dan menyerap lebih dari 16,5 juta tenaga kerja. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat total ekspor, termasuk CPO dan turunannya seperti oleokimia serta biodiesel, telah mencapai lebih dari 25 juta ton, naik 13,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ekspor tersebut menghasilkan devisa sebesar USD27,3 miliar, tumbuh 40% dibandingkan tahun 2024. Sementara itu, konsumsi minyak sawit dalam negeri mencapai 18,5 juta ton, sedikit lebih tinggi dibandingkan 17,6 juta ton pada tahun sebelumnya. Namun, di balik prospek cerah tersebut, masih terdapat berbagai permasalahan mendasar yang berpotensi menghambat keberlanjutan industri sawit dalam jangka panjang.

*Pertama*, fragmentasi regulasi. Selama lebih dari tiga dekade, pengelolaan sektor perkebunan sawit berada di bawah koordinasi banyak kementerian dan lembaga dengan mandat berbeda-beda, mulai dari perencanaan tata ruang, kehutanan, perkebunan, perdagangan, industri, hingga lingkungan hidup. Tumpang tindih kewenangan ini menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan pertama adalah ketidakselarasan data. Setiap instansi menggunakan basis data yang berbeda, baik terkait luas lahan, produksi, maupun status legalitas perkebunan. Akibatnya, tidak ada satu sumber data resmi yang dapat dijadikan rujukan bersama, sehingga menyulitkan perencanaan kebijakan berbasis bukti. Permasalahan kedua adalah tidak tercapainya target keberlanjutan. Dengan mandat yang terpecah, kebijakan keberlanjutan kerap kali menjadi tidak konsisten. Misalnya, program sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) berada di bawah kewenangan Kementerian Pertanian, sedangkan aspek lingkungan ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, serta aspek energi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tanpa koordinasi yang kuat, standar keberlanjutan nasional tidak akan mampu menjawab tuntutan global yang semakin tinggi. Permasalahan ketiga adalah iklim investasi yang kurang stabil. Investor menghadapi ketidakpastian regulasi karena aturan yang berubah-ubah dan tidak terintegrasi. Hal ini menurunkan minat investasi jangka panjang, padahal industri sawit membutuhkan kepastian hukum dan kebijakan yang konsisten untuk mendukung ekspansi berkelanjutan. Ketiga permasalahan tersebut secara keseluruhan pada akhirnya akan memperlemah daya saing industri sawit Indonesia di tengah tuntutan global akan transparansi, keberlanjutan, dan kepatuhan regulasi.

*Kedua*, tantangan keberlanjutan global berkaitan dengan hadirnya regulasi deforestasi Uni Eropa atau *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). EUDR lahir sebagai instrumen kebijakan untuk menekan laju penggundulan hutan secara global. Melalui regulasi ini, Uni Eropa mewajibkan perusahaan yang menempatkan, menyediakan, atau mengeksport komoditas tertentu (termasuk minyak sawit) ke pasar Eropa untuk memenuhi persyaratan ketat terkait

asal-usul produk, keterlacakan rantai pasok, serta bukti bahwa komoditas tersebut tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah batas waktu yang ditetapkan. Bagi Indonesia, EUDR menghadirkan dua sisi yang kontras. Di satu sisi, regulasi ini dapat menjadi peluang untuk memperbaiki tata kelola sawit nasional, mendorong transparansi data, memperkuat sistem keterlacakan, dan meningkatkan reputasi sawit Indonesia di pasar global. Namun di sisi lain, EUDR juga menuntut kepatuhan yang sangat ketat. Jika Indonesia gagal memenuhi standar tersebut, akses pasar ekspor ke Uni Eropa— yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama— berisiko dibatasi atau bahkan ditutup.

Dengan demikian, industri sawit Indonesia menghadapi paradoks. Di satu sisi prospek pertumbuhan dan kontribusi ekonomi sangat menjanjikan, namun di sisi lain terdapat tantangan regulasi dan keberlanjutan yang harus segera diatasi. Industri sawit Indonesia harus segera melakukan transformasi menuju praktik sawit berkelanjutan, dengan tata kelola yang terintegrasi, regulasi yang selaras, serta standar keberlanjutan yang diakui secara global. Hanya dengan langkah tersebut, sawit Indonesia dapat mempertahankan posisinya sebagai produsen utama global sekaligus menjawab tuntutan transparansi, keberlanjutan, dan daya saing internasional.

## Atensi DPR

Memasuki tahun 2026, industri sawit Indonesia menghadapi paradoks antara prospek pertumbuhan yang cerah dan tantangan keberlanjutan yang semakin kompleks. Terdapat sejumlah isu strategis yang menuntut perhatian serius dari Komisi VII DPR RI yang membidangi sektor industri. *Pertama*, Komisi VII DPR RI menekankan perlunya penataan menyeluruh terhadap tata kelola lintas kementerian dan lembaga agar standar data, target keberlanjutan, serta arah pembangunan industri sawit dapat berjalan secara selaras. Konsolidasi kewenangan menjadi prioritas untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan responsif terhadap dinamika global. *Kedua*, Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah memperkuat diplomasi perdagangan serta mempercepat penguatan dan internasionalisasi sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil Certification* (ISPO) agar sepenuhnya diakui sebagai standar keberlanjutan yang kredibel di tingkat internasional. Upaya ini dipandang penting untuk meningkatkan nilai tambah dan memastikan industri sawit Indonesia tetap kompetitif di tengah meningkatnya tuntutan global.

## Sumber

ekonomi.republika.co.id, 13 November 2025;  
industri.kontan.co.id, 13 November 2025; dan  
lestari.kompas.com, 14 November 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Rafika Sari  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Edmira Rivani  
Hilma Meilani

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Firyal Nabihah  
Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S.  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R.  
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikhah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*